

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Safaruddin<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Burhanuddin<sup>3</sup>, Hafiz Elfiansya Parawu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar  
e-mail : safaruddin@gmail.com

### Abstract

*The government has made various efforts to reduce poverty in Indonesia, one of which is through the Family Hope Program (PKH). This study aims to determine organizational behavior and inter-organizational relations (organizational and inter-organizational behavior), lower level implementor behavior (street level bureaucratic behavior), and target group behavior (target group behavior) in the implementation of Poverty Reduction Policy through PKH in Tamalate District Makassar. This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that in the aspect of organizational and interorganizational relations there was commitment from cross-sectoral organizations in the implementation of PKH, where the Social Service and Education Office were committed to the success of government programs in the Social and Educational Fields as an extension of their respective ministries. In the behavioral aspects of the implementor shows the efforts and steps taken by the lower level implementor, namely the facilitator, so that the PKH program can run more effectively and efficiently, although in some other aspects, the facilitator is still unable to take an action in overcoming an existing problem in the scope of the KMP. In the behavioral aspects of the target group showed a positive response to KPM by increasing the number of students participating in learning with the help of PKH in the field of education. The negative response arises from the lack of public understanding of PKH, so that in the process of channeling aid is still considered discriminatory.*

**Keywords:** Policy implementation, poverty, PKH.

### Abstrak

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku organisasi dan hubungan antarorganisasi (*organizational and inter-organizational behavior*), perilaku implementor level bawah (*street level bureaucratic behavior*), dan perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, pada aspek hubungan organisasi dan antarorganisasi terdapat komitmen dari organisasi lintas sektor dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari kementerian masing-masing. Pada aspek perilaku implementor menunjukkan adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh implementor level bawah, yakni pendamping, agar program PKH dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meskipun di beberapa aspek lainnya, pendamping masih belum mampu mengambil suatu tindakan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di lingkup KMP. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisipasi belajar siswa dengan adanya bantuan PKH pada bidang pendidikan. Adapun respon negatif muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH, sehingga dalam proses penyaluran bantuannya masih dinilai diskriminatif.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, kemiskinan, PKH.

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang membutuhkan pendekatan yang kompleks baik cara penanggulangan kemiskinan melalui program pemerintah hingga keterlibatan berbagai komponen di luar pemerintahan yang berkontribusi terhadap upaya Penanggulangan kemiskinan. Menurut data dari World Bank (2016), lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari. Jumlah ini sama

dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan.

Indonesia masih harus menghadapi 3 (tiga) masalah mendasar dalam upaya mengangkat sebagian besar penduduk yang masih terhimpit kemiskinan, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, dan perlindungan bagi penduduk miskin. Penanganan berbagai masalah ini memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat (Bhasin & Venkataramany, 2010).

Kemiskinan ada 2 (dua) macam, yakni kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin dari harta benda duniawi. Adapun kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya iman atau jiwa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

النَّفْسُ غَنَىٰ الْغِنَىٰ وَلَكِنَّ الْعَرَضَ كَثْرَةٌ عَنِ الْغِنَىٰ لَيْسَ

Artinya: “Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berbagai macam kebijakan yang di implementasikan oleh beberapa kementerian dan instansi pemerintah sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan pada tingkat pusat maupun daerah harus mampu mendorong dan mengangkat tingkat ekonomi masyarakat dari keterpurukan kemiskinan, dan masyarakat sendiri harus berupaya keluar dari keadaan miskin melalui pemberdayaan.

Pemerintah telah melakukan berbagai hal dalam upaya menanggulangi kemiskinan, namun kenyataannya di beberapa kota besar masih sering kita dapatkan berbagai macam permasalahan sosial, seperti kita jumpai di Kota Makassar. Pelaksana Tugas Dinas Sosial dalam news rakyatku.com, mengatakan bahwa salah satu pemasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Makassar yaitu masih maraknya anak jalanan (anjali) serta gelandangan dan pengemis (gepeng). Beberapa permasalahan sosial ini mencerminkan tidak optimalnya implementasi atau pelaksanaan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Salah satu program yang kini dijalankan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimulai sejak tahun 2007. Salah satu tujuan PKH ini adalah sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM) dan kegiatan ini merupakan bagian strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan dan tunai bersyarat. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan adanya perubahan perilaku yang

berkesinambungan akan peran pendidikan dan kesehatan sehingga menghasilkan generasi yang cerdas (Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2015).

Selain itu di beberapa penelitian yang ada, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian Sutiyo dan Maharjan (2011), dalam Rural poverty alleviation in Indonesia: programs and the implementation gap mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai macam program, diantaranya Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Tranfer Tunai Tanpa Syarat (TTTS). Beberapa program tersebut ternyata belum mampu mengentaskan kemiskinan secara efektif, disebabkan beberapa hal, yaitu birokrat yang tidak mampu dalam mengimplementasikan program-program, tanggapan elit lokal, dan mekanisme yang masih lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin Kiwang (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang”. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2007. Sampai dengan tahun 2018 tercatat ada sekitar 6.019 KK penerima PKH. Kendala peserta PKH adalah komunikasi lintas sektor dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan PKH, sehingga sering menimbulkan persoalan di lapangan. Para peserta PKH yang tidak melaksanakan komitmen sesuai dengan hasil verifikasi akan mendapat sanksi berupa potongan jumlah bantuan pada tahun berjalan. Kerja sama antara operator dan pendamping serta semua stakeholder menjadi kunci bagi suksesnya PKH di Kota Kupang.

Winter (Suratman, 2017: 143), mengemukakan ada 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu perilaku organisasi dan antarorganisasi (*organizational and inter organizational behavior*), perilaku birokrat tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*), dan perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*). Berdasarkan 3 (tiga) variabel tersebut maka yang diharapkan dalam pelaksanaan PKH yakni terjalinnnya hubungan antarorganisasi atau pihak-pihak yang terlibat dengan baik dalam hal komitmen dan

koordinasi dalam menjalankan program, pada aspek perilaku implementor level bawah diharapkan implementor dapat menjalankan program dengan baik dan mampu mengatasi segala macam keluhan masyarakat, dan pada aspek perilaku kelompok sasaran sangat diharapkan adanya perubahan sikap dari KSM sebagai efek dari pelaksanaan program ini. Ketiga variabel ini yang akan menjadi fokus peneliti untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH di Makassar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Instrumen penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi. Adapun informan penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Sosial Kota Makassar, Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar, Pendamping Program PKH di Kecamatan Tamalate, KK Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Bantuan Pendidikan di Kecamatan Tamalate, Kepala Seksi Pendidikan Dasar, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Analisis data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian tahapan yang dikemukakan Sugiyono (2012) dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKH atau *Conditional Cash Transfer (CCT)* adalah program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Dengan harapan, terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

PKH dalam pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ipres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 64 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai Peserta PKH, dan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

Penelitian mencoba untuk melihat Implementasi PKH hanya pada Bidang pendidikan dengan mengacu pada 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi (*organizational and interorganization implementation behavior*), perilaku implementor tingkat bawah (*street-level bureaucratic behavior*), dan perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*).

### Perilaku Organisasi

Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku hubungan antarorganisasi dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka penelitian ini berfokus pada indikator komitmen dan koordinasi antar organisasi.

Terdapat komitmen yang dibangun dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tamalate di targetkan 3906 KPM penerima PKH yang dirincikan dengan jumlah penerima PKH Bidang pendidikan. Adanya komitmen pemerintah dalam peningkatan penerima PKH di Bidang Pendidikan dengan meningkatkan anggaran penerima PKH. Pada indikator komitmen ini dapat dipahami bahwa komitmen pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah terlihat dari adanya kelembagaan yang memfasilitasi pelaksanaan PKH yang juga didukung dengan anggaran PKH secara nasional.

Pelaksanaan PKH oleh Dinas Pendidikan masih terbatas pada pelaksanaan PKH secara administratif, karena data KPM berdasarkan data dari Dinas Sosial, sehingga Dinas Pendidikan hanya sebatas memberikan rekomendasi bahwa siswa tersebut memang layak menerima bantuan KIP.

Koordinasi dilakukan pada aspek teknis yang dikoordinasikan melalui pejabat Eselon II wakil kementerian yang mengarahkan secara teknis, yang dikepalai secara teknis oleh ketua Bappeda dan pejabat Eselon II satuan kerja perangkat daerah tingkat Provinsi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi adalah koordinasi provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH dan koordinasi rutin partisipasi provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait dalam pelaksanaan PKH.

Pendamping berperan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap KPM. Pendampingan guna memastikan KPM yang memenuhi syarat mendapatkan program pendidikan dan meminta masyarakat untuk melaporkan diri ke sekolah untuk mendapatkan program KIP. Bila KPM mendapatkan masalah dalam proses permintaan bantuan di sekolah maka pendamping akan melapor ke Dinas Pendidikan.

Koordinasi dilakukan pada tingkatan pendamping PKH bersama pemerintah dan lembaga keuangan untuk membangun sinergi dalam pelaksanaan PKH guna mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun penerima ganda. Khusus pada bidang pendidikan koordinasi dilakukan bersama dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Dari penelitian aspek perilaku organisasi dapat diuraikan sejumlah hal, antara lain: (1) Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan antara lain Dinas Sosial Kota Makassar sebagai Tim Koordinator Teknis PKH, Koordinator Kecamatan dan pendamping PKH; (2) Peran masing-masing lembaga yang terlibat Koordinasi Teknis PKH pada tingkatan Provinsi adalah koordinasi untuk mendukung pelaksanaan PKH dan koordinasi rutin partisipasi provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait dalam pelaksanaan PKH. Sementara pada tingkatan pemerintah Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berperan sebagai pengarah, dan

kecamatan yang mengatur koordinasi pendamping pada tingkat Kota kemudian Kecamatan. Adapun peran Dinas Pendidikan Kota Makassar memberikan laporan pelaksanaan KIP yang telah diusulkan melalui rekomendasi sekolah yang menunjukkan bahwa murid tersebut masih aktif; (3) Pendamping berperan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap KPM. Pendampingan dilakukan untuk memastikan KPM yang memenuhi syarat mendapatkan program pendidikan meminta masyarakat untuk melaporkan diri ke sekolah untuk mendapatkan program KIP. Bila KPM mendapatkan masalah dalam proses permintaan bantuan di sekolah, maka pendamping melapor ke Dinas Pendidikan. Sementara itu, Dinas sosial berperan dalam penyusunan data penerima, melakukan supervisi pelaksanaan, dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan KIP; (4) Komitmen Dinas Pendidikan dalam hal pelaksanaan PKH masih terbatas karena tugasnya hanya memastikan pelaksanaan PKH secara administratif terselenggara, sementara komitmen Dinas Sosial adalah sebagai pengarah teknis daerah yang memastikan terselenggaranya PKH, mulai dari anggaran, SDM, dan sarana pendukung PKH; (5) Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai pada tingkat koordinasi teknis Kota Makassar. Secara umum koordinasi berjalan dengan baik untuk persiapan kecamatan dalam penyelenggaraan PKH koordinasi yang bersifat rutin kecuali koordinasi pada Dinas Pendidikan hanya sebatas pemberian laporan, namun koordinasi sedikit terkendala dengan adanya perubahan pejabat atau mutasi pegawai yang akan dibahas lebih lanjut pada indikator kontrol politik.

### **Perilaku implementor (aparatur/ birokrat)**

Terkait implementor level bawah (*street-level bureaucratic behavior*) dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Pendamping PKH merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program yang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan di luar kewenangan formal (diskresi). Tugas utama

pendamping PKH yaitu melakukan pendampingan kepada KPM dan mengakses setiap program-program pemerintah lainnya serta membina KPM menjadi keluarga mandiri, ungkapan tersebut menunjukkan pengabdian pada masyarakat yang secara khusus agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Namun, dalam pelaksanaan program PKH pendamping menghadapi beberapa kendala di lapangan salah satunya yaitu bentuk komplain dari masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif dalam proses penyaluran bantuan. Sehingga dibutuhkan langkah atau upaya yang dilakukan oleh pendamping untuk mengatasi problematika yang ada di lapangan. Adapun langkah yang dilakukan oleh pendamping terkait *street-level bureaucratic behavior* yaitu mencoba menjelaskan sebaik-baiknya kepada masyarakat bahwa program PKH merupakan program bantuan bersyarat, dimana ada beberapa komponen yang harus dimiliki untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pendamping, mulai dari proses pelaksanaan PKH, kendala-kendala yang didapatkan di lapangan, serta proses penanganan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, maka pendamping idealnya adalah seseorang yang paham betul akan mekanisme dan prosedur pelaksanaan PKH, sehingga dapat bekerja dengan mudah dan dapat mengatasi segala macam problematika yang ada di lapangan.

Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat pemerintah daerah yang berada pada level bawah yang bertugas melayani masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari pendataan penduduk, administrasi kependudukan, dan berbagai surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil observasi peneliti di lapangan, masyarakat harus meminta surat keterangan masyarakat tidak mampu sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Terlihat pula adanya diskreasi kelurahan dalam proses pendataan penduduk dengan memberdayakan RT/RW dalam proses pendataan masyarakat miskin, dimana hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan kerja kelurahan.

Sekolah SD/SMP ditunjuk sebagai UPTD yang menyelenggarakan program pemerintah pada bidang pendidikan, dimana di setiap

sekolah terdapat operator yang bertugas khusus untuk menerima dan menverifikasi laporan dan data dari masyarakat miskin yang akan di input ke sistem Dapodik, sebagai bahan usulan yang akan dikirim dan diverifikasi kembali oleh Dinas Pendidikan, kemudian dikeluarkan sebagai KPM penerima bantuan di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan operator Dapodik yang ada di sekolah menunjukkan sebuah diskresi dari pihak sekolah selaku pihak yang mensyaratkan setiap KPM yang telah mendapatkan bantuan program pendidikan untuk membawa pot beserta bunga, upaya ini sebagai bentuk kontribusi ringan dari KPM terhadap keindahan sekolah. Pihak sekolah juga mengidentifikasi data yang masuk untuk memastikan status kelayakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pada bidang pendidikan.

### **Perilaku Kelompok Sasaran**

Guna mengetahui dan menganalisa perilaku kelompok sasaran dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka penelitian ini berfokus pada indikator respon positif dan respon negatif.

Pemberian bantuan pendidikan menjadi lebih optimal karena adanya pengawasan dari pendamping PKH yang memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat, khususnya di bidang pendidikan, menggunakan dana bantuan untuk biaya kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Program ini dinilai masih belum tepat sasaran diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dimana disinyalir adanya penerima bantuan yang diprioritaskan dikarenakan unsur kedekatan dengan pemerintah setempat, padahal masih ada keluarga yang secara faktual kondisinya masih lebih layak untuk menerima bantuan.

Dari hasil penelusuran peneliti terkait perilaku kelompok sasaran ini dapat diuraikan temuan, antara lain: (1) Perilaku sejumlah oknum yang memanfaatkan PKH dalam hal pemilihan legislatif, sehingga mempengaruhi perilaku kelompok sasaran untuk menentukan pilihan politiknya; (2) Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya sikap acuh dari masyarakat terhadap proses kelengkapan administrasi seperti pengurusan kartu keluarga

(KK) dan administrasi lainnya sehingga sulit terdeteksi oleh sistem sebagai sasaran penerima manfaat; dan (3) Perilaku acuh kelompok penerima manfaat memberikan pengaruh pada permasalahan data, sehingga ada beberapa masyarakat yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan tetapi belum mengakses bantuan PKH. Hal ini disebabkan karena data yang dipakai dalam proses pemutakhiran penerima bantuan masih mengacu pada data tahun 2015 yang belum terupdate.

### **Pembahasan**

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ditinjau dari dimensi implementasi kebijakan, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor, dan perilaku kelompok sasaran, menunjukkan perilaku hubungan antar organisasi yang memiliki komitmen yang dibangun dari pemerintah pusat, provinsi dan Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate ditargetkan 3906 orang penerima PKH. Selain jumlah penerima manfaat yang tersebar, komitmen pelaksanaan PKH diwujudkan dengan adanya anggaran PKH yang melibatkan sejumlah komponen.

Komitmen UPPKH dalam penanggulangan kemiskinan melalui PKH pada Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat, dimana Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap data yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penerimaan bantuan di Bidang Pendidikan untuk memberikan rekomendasi berupa kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial maupun berupa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait dengan mengacu pada administrasi kependudukan yang membuktikan bahwa masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin dan bersyarat mendapatkan bantuan di Bidang Pendidikan. Adapun Dinas Pendidikan sendiri berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintah pada Bidang Pendidikan dengan memastikan usulan data yang diterima untuk diverifikasi dari sekolah sudah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada.

Sementara koordinasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kecamatan, koordinasi dilakukan pada level

UPPKH pusat sampai UUPKH kecamatan. Adapun koordinasi pada tingkat kota dilakukan oleh Dinas Sosial selaku UUPKH Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kabid Sosial melalui rapat koordinasi kabupaten yang dihadiri oleh beberapa pemda dan beberapa instansi yang terkait dalam pelaksanaan program PKH, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Pada aspek hubungan organisasi dan antarorganisasi menunjukkan adanya komitmen dari organisasi lintas sektor dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial yang berperan untuk memastikan persiapan daerah menjalankan PKH yang prima sebagai saluran informasi utama pada tingkat Kabupaten/Kota serta mendorong partisipasi penyedia jasa dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan prima. Adapun Dinas Pendidikan sebagai organisasi lintas sektor, berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Pendidikan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan. Kemudian, pada aspek koordinasi organisasi dan antarorganisasi diwujudkan dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan PKH dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait dalam pelaksanaan PKH.

Pada aspek perilaku implementor level bawah (aparatur/birokrat), pendamping PKH merupakan sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan sebagai implementor level bawah. Pendamping PKH merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan PKH, dimana pendamping selaku orang terdekat dari KPM berfungsi sebagai mediator masyarakat miskin untuk mendapatkan beberapa jenis bantuan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada mengenai dikreasi implemator level bawah, pendamping melakukan usaha agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui pembentukan kelompok dan ketua kelompok dari KPM itu sendiri, sehingga hal ini akan memudahkan pendamping untuk mengerjakan

tugasnya untuk mengumpulkan masyarakat dalam proses pembinaan.

Pemerintah Kelurahan merupakan perangkat pemerintah daerah yang berada pada level bawah yang bertugas melayani masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari pendataan penduduk, administrasi kependudukan, berbagai surat keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil obsevasi peneliti di lapangan, masyarakat diharuskan meminta surat keterangan sebagai masyarakat tidak mampu sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Dan dari hasil wawancara yang ada menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh kelurahan dalam proses pendataan penduduk dengan memberdayakan RT/RW dalam proses pendataan masyarakat miskin guna lebih memudahkan kerja pihak kelurahan.

SD/SMP yang ditunjuk sebagai UPTD menyelenggarakan program pemerintah pada Bidang Pendidikan, dimana di setiap sekolah terdapat operator yang bertugas khusus untuk menerima dan menverifikasi laporan dan data dari masyarakat miskin yang akan di input masuk ke sistem Dapodik, sebagai bahan usulan yang akan dikirim dan diverifikasi kembali oleh Dinas Pendidikan, kemudian dikeluarkan sebagai KPM penerima bantuan di Bidang Pendidikan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan operator Dapodik sekolah menunjukkan sebuah diskresi dari pihak sekolah yang mensyaratkan setiap KPM yang telah mendapatkan bantuan program pendidikan untuk membawa pot beserta bunga, upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk kontribusi ringan dari KPM terhadap keindahan sekolah. Selain itu pihak sekolah mengidentifikasi data yang masuk untuk memastikan status kelayakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pada Bidang Pendidikan.

Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif, yaitu bantuan pendidikan yang diperoleh masyarakat memiliki nilai nominal yang berbeda-beda, dimana untuk siswa SMP memperoleh Rp.1.500.000,- yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti perlengkapan tulis, pakaian, dan buku. Pemberian bantuan pendidikan perlu dipastikan manfaatnya agar lebih optimal, untuk itu diperlukan pengawasan dari

pendamping PKH agar dapat memastikan masyarakat penerima manfaat khusus bidang pendidikan ini menggunakan dana bantuan untuk biaya kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Adapun respon negatif terkait program yang dinilai masih belum tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, dimana disinyalir adanya penerima bantuan yang diprioritaskan dikarenakan unsur kedekatan dengan pemerintah setempat, padahal masih ada keluarga yang secara faktual kondisinya masih lebih layak untuk menerima bantuan., ada pula oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan program PKH untuk memperoleh keuntungan elektoral agar terpilih dalam pemilihan legislatif. Kondisi ini mencerminkan rentannya PKH dipolitisasi, sehingga pengawasan dinas terkait dan laporan langsung dari masyarakat akan ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib.

Dari temuan penelitian mengenai respon negatif menunjukkan adanya sikap acuh dari masyarakat terhadap proses kelengkapan administrasi seperti pengurusan kartu keluarga (KK) dan administrasi lainnya sehingga sulit terdeteksi oleh sistem sebagai sasaran penerima manfaat. Perilaku acuh kelompok penerima manfaat memberikan pengaruh pada permasalahan data, sehingga ada beberapa masyarakat yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan tetapi belum mengakses bantuan PKH.

#### 4. KESIMPULAN & SARAN

##### Kesimpulan

- a. Aspek hubungan organisasi dan antarorganisasi menunjukkan adanya komitmen dari organisasi lintas sektor dalam pelaksanaan PKH, dimana Dinas Sosial berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial yang berperan untuk memastikan persiapan daerah menjalankan PKH yang prima sebagai saluran informasi utama pada tingkat Kabupaten/Kota serta mendorong partisipasi penyedia jasa dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan prima. Adapun Dinas Pendidikan sebagai organisasi lintas sektor berkomitmen menyukseskan program pemerintah di Bidang Pendidikan sebagai perpanjangan

tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan. Kemudian pada aspek koordinasi organisasi dan antarorganisasi diwujudkan dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan PKH dan koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait dalam pelaksanaan PKH.

- b. Pada aspek perilaku implementor (*street bureaucratic behavior*) menunjukkan adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh implementor pada level bawah, yakni pendamping, dalam upaya melakukan tindakan yang lebih efisien dan efektif dalam proses pembinaan dan pendampingan kepada KPM dengan membentuk kelompok KPM pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate yang diketuai oleh salah satu KPM yang dianggap aktif dalam setiap pertemuan. Namun, di beberapa aspek lainnya, pendamping belum mampu mengambil suatu tindakan yang dapat mengatasi masalah yang ada di lingkungan KPM, padahal mereka harus mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di lapangan tanpa mengabaikan aturan yang ada.
- c. Pada aspek perilaku kelompok sasaran menunjukkan respon positif KPM dengan meningkatnya angka partisipasi belajar siswa dengan adanya bantuan PKH pada Bidang Pendidikan. Adapun respon negatif muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH, sehingga dalam proses penyaluran bantuan masih dinilai diskriminatif.

#### Saran

1. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan PKH harus lebih dioptimalkan, dan sinergitas antara unit pelaksana program dengan pemerintah daerah juga masih perlu ditingkatkan.
2. Program pelatihan kepada implementor tingkat bawah perlu ditingkatkan guna dapat memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh KPM, sehingga cepat dan tepat dalam mengambil suatu tindakan

untuk mengatasi problematika yang ada di lapangan.

3. Sosialisasi harus lebih dioptimalkan, tidak hanya kepada KPM, tapi juga kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, sehingga secara umum mereka bisa memahami alur dan mekanisme PKH.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Rozi. (2011). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus di Desa Batakan dan Kelurahan Pelaihari)*. Jurnal Program Magister Sains Administrasi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat (MSAP-UNLAM). Vol. 1 No. 2.
- Bhasin, B. B., & Venkataramany, S. (2010). *Globalization of entrepreneurship: Policy considerations for SME development in Indonesia*. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(4).
- Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 709-714.
- Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). *Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian conditional cash transfer programme* (No. 42). International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2009). *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Purwanto, Agus dkk. (2013). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Vol. 16 No. 2.
- Rudnycky, D. (2009). *Spiritual economies: Islam and neoliberalism in contemporary Indonesia*. Cultural anthropology, 24(1), 104-141.

- Sugiyanto, S. (2015). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Jeneponto, Sulawesi Selatan*. Jurnal Sosio Konsepsia, 160-176.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujianto, G. E. I. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik, Teori dan Praktik*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2011). *Rural poverty alleviation in Indonesia: programs and the implementation gap*. Journal of International Development and Cooperation, 18(1), 13-22.
- Winter, Soren (1990). *Integrating Implementation Research, eds. In Implementation and the Policy Process, Opening the Black Box*, Greenwood Press.
- World Bank. (2016). *Indonesian Expanding Horizons*. Indonesia Policy